



PERAN PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KELOMPOK RENTAN DALAM PERSIAPAN MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI

Muhammin Jazali¹, Endah Tri Wulandari², Joko Murdiyanto²

¹Mahasiswa Diploma IV Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

²Dosen Diploma IV Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

*Alamat Korespondensi: muhaiminjazali@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang: Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, terutama gempa bumi. Kalurahan Parangtritis, yang berada di Kabupaten Bantul, DIY, merupakan salah satu wilayah rawan gempa karena lokasinya dekat dengan zona subduksi dan Samudera Hindia. Kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas menjadi pihak paling terdampak dalam bencana.

Tujuan: Untuk mengetahui program yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Prangtritis untuk meningkatkan kapasitas kelompok rentan dalam menghadapi gempa bumi.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Populasi sampel yaitu RT, Dukuh, anggota kantor Kalurahan, dan FPRB. Peneliti menentukan informan secara acak berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditentukan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang.

Hasil: Penelitian ini menghasilkan empat tema, yaitu tema I: konsep bencana, tema II: mitigasi bencana, tema III: kesiapsiagaan masyarakat, tema IV: tanggap darurat bencana, tema V: evaluasi pasca bencana. Informan dalam penelitian ini menggambarkan bencana itu ada gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor, abrasi, kekeringan, kebakaran, dan kecelakan.

Kesimpulan: Pemerintah melakukan upaya sosialisasi, pelatihan, pendidikan yang diberikan pada masyarakat dan kelompok rentan, serta pada anak-anak sejak dulu. Selain itu adanya koordinasi dan evaluasi dengan beberapa instansi dan juga dengan kelompok lain pada saat mitigasi ataupun pada saat terjadi bencana gempa bumi.

Kata Kunci: Gempa Bumi, Kelompok Rentan, Peran Pemerintah

PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia merupakan salah satu dari negara yang mempunyai tingkat potensi bencana yang lumayan tinggi. Berdasarkan dari data World risk report tahun 2018, Indonesia ternyata menduduki urutan ke 36 dengan indeks risiko bencana dari 172 negara yang paling rawan di dunia (Hadi *et al.*, 2019). Hal tersebut dikarenakan Indonesia secara tektonis merupakan tempat bertemunya tiga lempeng tektonik dunia (Eurasia, IndoAustralia, dan juga Pasifik), yang secara vulkanis merupakan jalur gunung api aktif yang biasa dikenal

dengan cincin api pasifik atau Pacific ring of fire (Hermon, 2014). Kemudian hal inilah yang menyebabkan terjadinya bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami.

Gempa bumi adalah satu fenomena alam yang dapat disebabkan oleh peristiwa alam maupun kegiatan manusia dan menyebabkan gelombang energi memancar dari pusat gempa atau fokus bergetar di seluruh tanah. Gelombang ini dapat berasal dari peristiwa mekanik, seperti tumbukan, gesekan, dan tarikan, atau dari peristiwa kimis, seperti ledakan akibat reaksi kimia (Purwanto *et al.*,

2023). Gempa bumi di Indonesia, sebagai salah satu bentuk bencana alam, sering kali mengakibatkan hilangnya nyawa dalam jumlah besar dan kerusakan besar pada bangunan dan infrastruktur. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah yang sangat rentan terhadap bencana gempa bumi. Berdasarkan catatan sejarah sejak tahun 1800-an, sudah terjadi lima kali bencana gempa bumi tektonik yang memiliki kekuatan 6,3 (SR). Wilayah yang mengalami dampak paling parah dalam bencana gempa bumi pada tahun 2006 adalah Kabupaten Bantul dengan jumlah korban jiwa meninggal sebanyak 5.782 jiwa (Sulistiyana, 2018).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah yang sangat rentan terhadap bencana gempa bumi. Berdasarkan catatan sejarah sejak tahun 1800-an, sudah terjadi lima kali bencana gempa bumi tektonik yang memiliki kekuatan 6,3 (SR). Wilayah yang mengalami dampak paling parah dalam bencana gempa bumi pada tahun 2006 adalah Kabupaten Bantul dengan jumlah korban jiwa meninggal sebanyak 5.782 jiwa (Sulistiyana, 2018).

Mitigasi merupakan suatu cara untuk meminimalisir risiko bencana alam khususnya gempa bumi. Pendekatan ini tidak hanya menurunkan risiko bencana secara fisik, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan dan kapasitas untuk menanggapi kejadian tersebut (Yanuarto *et al.*, 2019). Masyarakat perlu peka terhadap kondisi yang dapat memicu bencana dan mengenali tanda-tanda peringatan dini dari perubahan cuaca. Edukasi mengenai prosedur yang harus diikuti saat terjadi bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan dini sangat penting, agar masyarakat dapat memahami potensi terjadinya bencana dan mengurangi dampak yang paling parah (Buchari, 2020).

Menurut UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa kelompok rentan merupakan kelompok masyarakat berisiko tinggi, karena berada

dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan mempersiapkan diri dalam menghadapi risiko bencana atau ancaman bencana. Peran pemerintah pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuan mengidentifikasi peluang bencana di sekitarnya dan meningkatkan keterampilan penanganan diri sangat diperlukan untuk mengurangi dampak dari pengaruh bencana. ke dalam (0,5 cm). Bagian akhir pendahuluan harus memuat tujuan penelitian.

METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode wawancara. Pemilihan subjek menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan cara wawancara semi terstruktur dengan berpedoman pada lima indicator. Penelitian ini terdapat satu variabel yaitu peran Pemerintah Kalurahan Parangtritis dalam meningkatkan kapasitas kelompok rentan dalam menghadapi bencana gempa bumi, serta informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yaitu tiga anggota kantor Kalurahan Parangtritis, satu orang anggota FPRB Parangtritis, satu Dukuh, dan dua orang RT. Uji validitas dan reabilitas dalam penelitian ini berdasarkan pendapat dari Sugiyono (2019) yang menyebutkan uji kebenaran data pada penelitian kualitatif meliputi uji kreadibilitas yang dilakukan dengan triangulasi dan membercheck, setelah itu akan dilakukan transferabilitas, dependabilitas, serta konfirmabilitas.

HASIL

Informan dalam penelitian ini adalah RT, Dukuh, anggota kantor Kalurahan, dan FPRB Kalurahan Prangtritis. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Peneliti menentukan informan secara acak namun berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Kejemuhan data pada penelitian ini didapatkan pada narasumber ke lima serta dua narasumber sebagai konfirmasi data. Jumlah informan pada

penelitian ini sesuai dengan teori Creswell (2019) yang menyebutkan bahwa jumlah informan dalam penelitian kualitatif untuk mencapai kejenuhan data yaitu 5 sampai 10 informan.

Setelah melakukan analisis data, peneliti menemukan lima tema yang menggambarkan peran Pemerintah Parangtritis dalam meningkatkan mapasitas melompok rentan dalam Persiapan menghadapi risiko bencana gempa bumi diantaranya adalah konsep bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, tanggap darurat bencana, dan evaluasi pasca bencana.

Tema I: Konsep Bencana

Tema ini menggambarkan bagaimana konsep bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Konsep bencana dalam penelitian ini digambarkan dalam beberapa kategori diantaranya yaitu: daerah rawan bencana, pengalaman bencana, dan contoh bencana. Pendeskripsian koding dan kategorik yang menyusun tema konsep bencana alam dapat terlihat pada table 2 mengenai konsep bencana.

Kategori 1 membahas mengenai pengalaman bencana yang dialami narasumber. Ada beberapa pengalaman yang kejadian bencana yang sampaikan oleh narasumber. Kejadian bencana yang di gambarkan oleh narasumber adalah pengalaman gempa 2006. Penggambaran pengalaman kejadian bencana menurut informan dapat dilihat melalui penyataan berikut ini:

“Setelah mengalami gempa tahun 2006, ini bangunan disini tahan gempa semua karena bangunan itu mudah roboh” (N1, Dukuh)

“Berhubungan untuk kejadian 2006 kemarin banyak rumah yang roboh” (N5, FPRB)

“Kalaupun gempa, kemarin pengalaman ya gempa itu 2006, udah lama ibaratnya” (N6, RT)

Kategori 2 yaitu daerah rawan bencana. Daerah rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Dalam kategori ini, narasumber mengatakan bahwa kawasan parangtritis merupakan kawasan yang rawan bencana yang dapat dilihat dari pernyataan berikut ini :

“Tantangannya disini daerah yang rawan” (N1, Dukuh)

“Di sini hitungannya, bencana itu ibaratnya, sebenarnya daerah rawan” (N6, RT)

Kategori 3 yaitu contoh bencana. Bencana itu ada bermacam macam, ada yang disebabkan faktor alam, non-alam, atau sosial. Dalam kategori ini, narasumber mengatakan bahwa potensi terjadinya bencana di wilayah Kalurahan Parangtritis tidak hanya gempa bumi seperti yang dapat dilihat dari pernyataan berikut ini:

“Potensi-potensi tidak hanya gempa bumi sebenarnya, yang jelas gempa bumi itu tidak lepas dari ancaman tsunami. Terus yang di sisi lain itu kan ada kebakaran, ada banjir, ada tanah longsor, bahkan mungkin kekeringan potensinya, abrasi juga ada di situ” (N3, Kalurahan)

Tema II: Mitigasi Bencana

Tema ini membahas mengenai kegiatan dan upaya Pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Mitigasi bencana memberikan gambaran tentang bagaimana rencana disusun untuk mengurangi atau mencegah kerugian akibat bencana. Mitigasi bencana digambarkan dalam kategori ini berupa upaya pemerintah, pemeberdayaan masyarakat, infrastruktur dan fasilitas, instansi dan kelompok, dan media komunikasi. Deskripsi katagori dan koding yang menyusun manajemen bencana dapat di lihat pada table 3.

Kategori 1 yaitu Upaya Pemerintah: Upaya pemerintah dalam mempersiapkan

mitigasi bencana berdasarkan pernyataan narasumber dapat dilihat dari pernyataan berikut ini:

“Beberapa tokoh masyarakat yang kami ambil di forum itu untuk mensosialisasikan apa yang kaitannya dengan kebencanaan” (N5, FPRB)

“Mengajukan anggaran untuk adanya sosialisasi, pelatihan, dan lain-lain” (N4, Kalurahan)

“Kalurahan suka memberikan suporting anggaran” (N2, Kalurahan)

“Yang jelas yang pertama itu sebagai tangan kanan kelurahan di bidang kebencanaan itu kan ada FPRB” (N3, Kalurahan)

“Pemerintah Kalurahan itu kan bekerja sama dengan BMKG, BPBD” (N4, Kalurahan)

“Berkoordinasi khususnya yang ada di Parangtritis ini ada GAPOKTAN, ada Dukuh ada RT, terus kemudian ada Jaga Warga ada LINMAS, terus kemudian kelompok Karang Taruna” (N5, FPRB)

Kategori 2 Pemberdayaan Masyarakat. Dalam kategori ini, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dari pernyataan narasumber berikut ini :

“Kita buatkan sebuah hibauan atau edukasi terkait hal-hal yang memang belum dipahami oleh masyarakat” (N7, RT)

“Mengedukasi masyarakat terus menerus biar semakin sadar dan semakin berdaya” (N1, Dukuh)

Kategori 3 yaitu Infrastruktur dan fasilitas. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari pernyataan berikut ini :

“Sirine itu ada, ya kalau di sini ada, terus ada tanda tanda tsunami, kemudian juga jalur evakuasi dengan dipasang istilahnya penunjuk disini evakuasi” (N1, Dukuh)

“Pembangunan peringatan dini atau alaram atau yang lain kayak sistem EWS itu sendiri ada di area pantai” (N3, Kalurahan)

Kategori 4 yaitu instansi dan kelompok. Instansi dan kelompok merupakan lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana. Dalam kategori ini narasumber memberikan gambaran mengenai instansi dan kelompok yang berperan dalam koordinasi kebencanaan yang dapat dilihat dari pernyataan berikut ini.

Kategori 5 yaitu media komunikasi. Media komunikasi sebagai sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan dalam mitigasi bencana. Dalam kategori ini narasumber memberikan gambaran media komunikasi yang digunakan, dapat dilihat dari pernyataan berikut ini :

“Kalau untuk yang sifatnya menggunakan teknologi ya itu tadi, hanya grup whatsapp kita sharing-sharing informasi” (N4, Kalurahan)

“Untuk informasi, itu kami dari BMKG menggunakan aplikasi WRS, terus untuk kemunikasi dengan BPBD kami pakai HT” (N5, FPRB)

“Kita melalui media sosial, melalui live, melalui ini kita sering melakukan tanya-jawab” (N7, RT)

Tema III: Kesiapsiagaan Masyarakat

Tema ini membahas mengenai pengetahuan dan sikap dari masyarakat dan kelompok rentan dalam persiapan kebencanaan. Sumber daya manusia digambarkan dalam kategori ini berupa pengetahuan dan sikap masyarakat serta kelompok rentan. Deskripsi katagori dan koding yang menyusun manajemen bencana dapat di lihat pada table 4.

Kategori 1 yaitu pengetahuan dan sikap masyarakat. Pengetahuan dan sikap masyarakat dapat di lihat dari pernyataan berikut ini :

“Kalau masyarakat Kalurahan Parangtritis alhamdulillah katitannya dengan kebencanaan alhamdulillah 95% sudah paham” (N5, FPRB)
“Penanganan bencana atau simulasinya, walaupun secara umum belum semua mengetahui, baik dari anggota sendiri maupun dari warga-warga pada umumnya” (N3, Kalurahan)

Kategori 2 yaitu kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud adalah pendidikan dan sikap mereka dalam menghadapi bencana gempa. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengatakan bahwa :

“Anak anak itu lewat sejak dari dini, sejak PAUD itu mereka istilahnya diberi pengetahuan jadikan pelatihan pada waktu itu tingkat masing masing itu” (N1, Dukuh)
“Kegiatan rentan lainnya seperti disabilitas, disabilitas itu juga pernah dilakukan dari pihak kalurahan itu melalui program-program yang telah dilakukan oleh kader” (N3, Kalurahan)
“Anak-anak TK, PAUD itu sudah diajarkan bagaimana adanya mitigasi bencana” (N3, Kalurahan)

Tema IV: Tanggap Darurat Bencana

Tema ini membahas mengenai respon yang dilakukan saat terjadinya bencana atau bisa disebut juga intra bencana dengan tujuan menangani dampak buruk yang ditimbulkan saat bencana terjadi. Deskripsi katagori dan koding yang menyusun tanggap darurat dapat di lihat pada table 5.

Katagori ini membahas intra bencana. Pada saat intra bencana, narasumber mengatakan bahwa :

“Di situasi bencana itu biasanya kita keos, artinya bener-bener kita kerepotan” (N7, RT)
“SAR adalah tenaga penyelamatan, artinya kami adalah petugas yang pada saat terjadi bencana atau terjadi sebuah kecelakaan, kamilah petugas yang mengevakuasi” (N7, RT)

Tema V: Evaluasi Pasca Bencana

Dalam tema ini membahas mengenai tindakan yang dilakukan pada saat bencana selesai, atau bisa juga disebut pasca bencana. Pada pasca bencana tindakan dilakukan dalam upaya penanganan dampak dari bencana tersebut. Deskripsi katagori dan koding yang menyusun tanggap darurat dapat di lihat pada table 6

Kategori 1 membahas pasca bencana. Pada saat setelah terjadinya bencana, tindakan dan upaya apa yang akan dilakukan yang bertujuan menangani dampak buruk dari bencana. Dalam kategori ini narasumber mengatakan bahwa :

“Upaya-upaya pencegahan, terus upaya penanganan dan juga mungkin pasca bencananya itu bisa kita lakukan tindakan apa” (N7, RT)

“Untuk yang sudah-sudah terjadi itu, kita evaluasinya ya, kebutuhan kita kurangnya apa” (N7, RT)

PEMBAHASAN

Tema I: Konsep Bencana

Tema ini menggambarkan konsep bencana dengan kategori pengalaman bencana, daerah rawan bencana, dan contoh bencan. Bencana alam muncul dari fenomena alam, termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, tornado, tanah longsor, dan banyak lagi (Anita *et al.*, 2021). Sedangkan bencana non alam menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana , antara lain iyalah kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantarksaan. Fenomena bencana yang digambarkan sesuai dengan pernyataan informan yaitu *“Potensi-potensi tidak hanya gempa bumi sebenarnya, yang jelas gempa bumi itu tidak lepas dari ancaman tsunami. Terus yang di sisi lain itu kan ada kebakaran,*

ada banjir, ada tanah longsor, bahkan mungkin kekeringan potensinya, abrasi juga ada di situ”.

Salah satu daerah yang sangat rentan terhadap bencana gempa bumi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah yang mengalami dampak paling parah dalam bencana gempa bumi pada tahun 2006 adalah Kabupaten Bantul dengan jumlah korban jiwa meninggal sebanyak 5.782 jiwa (Sulistiyana, 2018). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan mengatakan bahwa “*Berhubungan untuk kejadian 2006 kemarin banyak rumah yang roboh*”. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Bawono (2016), bahwa pada tanggal itu, gempa yang sangat kuat mengguncang Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Dampak gempa tersebut mengakibatkan kerusakan pada bangunan struktural dan infrastruktur, fasilitas umum, tempat wisata, serta usaha masyarakat.

Tema II: Mitigasi Bencana

Tema ini menggambarkan tentang mitigasi bencana yang tersusun atas beberapa kategori seperti upaya pemerintah, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan fasilitas, instansi dan kelompok, dan media sosial. Mitigasi merupakan suatu cara untuk meminimalisir risiko bencana alam khususnya gempa bumi. Pendekatan ini tidak hanya menurunkan risiko bencana secara fisik, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan dan kapasitas untuk menanggapi kejadian tersebut (Yanuarto *et al.*, 2019). Bentuk mitigasi bencana yang tepat, yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan, penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana, serta menyelenggarakan pendidikan serta penyuluhan (Septiawan & Burhanuddin, 2022). Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan yang di sampaikan narasumber bahwa “*Beberapa tokoh masyarakat yang kami ambil di forum itu untuk mensosialisasikan apa yang kaitannya dengan kebencanaan*”. Ada juga

pernyataan lain dari narasumber yang mengatakan bahwa “*Mengajukan anggaran untuk adanya sosialisasi, pelatihan, dan lain-lain*”. Pernyataan tersebut sesuai dan telah diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007, penyediaan dan pengalokasian anggaran dana bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu, narasumber mengatakan bahwa “*Kita buatkan sebuah hibauan atau edukasi terkait hal-hal yang memang belum dipahami oleh masyarakat*” dan juga ada narasumber yang mengatakan “*Mengedukasi masyarakat terus menerus biar semakin sadar dan semakin berdaya*”. Hal ini sejalan dengan pendapat Sidik (2024) Pemberdayaan komunitas dalam menghadapi bencana adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengelola sumber daya, memanfaatkan peluang, serta mengasah keterampilan dalam persiapan menghadapi bencana.

Terkait mitigasi juga diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007. Berkaitan dengan peringatan dini, dalam hal ini narasumber berpendapat bahwa “*Sirine itu ada, ya kalau di sini ada, terus ada tanda tanda tsunami, kemudian juga jalur evakuasi dengan dipasang istilahnya penunjuk disini evakuasi*”. Hal ini sejalan dengan UU 24 Tahun 2007 yang berisi mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Selain dengan pembangunan sirine, pembangunan jalur evakuasi, petunjuk evakuasi, pembangunan akses jalan, titik kumpul, tempat evakuasi, serta pembangunan rumah tahan gempa sangatlah penting dilakukan seperti yang dibahas oleh Hakim & Agustina (2021) yang menyebutkan bahwa salah satu langkah mitigasi yang dapat diambil adalah dengan membuat peta untuk jalur evakuasi serta tempat penampungan pengungsi.

Pemerintah desa adalah unit pemerintahan yang paling dasar dalam struktur yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional indonesia. Ini menunjukkan pemerintah desa berperan sebagai organisasi terdepan dalam pelaksanaan pelayanan publik, karena mereka secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari RT (rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Kepala Desa dan kepala Kalurahan. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana gempa bumi diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah mereka sendiri, termasuk penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya pemerintah desa dalam upaya penanggulangan bencana yaitu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang ini, FPRB berfungsi sebagai wadah untuk mengkoordinasikan berbagai inisiatif dan upaya pengurangan risiko bencana di tingkat daerah, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan dari narasumber bahwa “Yang jelas yang pertama itu sebagai tangan kanan kelurahan di bidang kebencanaan itu kan ada FPRB”.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menyatakan Pemerintah Daerah juga harus berkoordinasi dengan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta lembaga lainnya dalam tujuan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana dan terpadu. Pemerintah daerah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD provinsi untuk memastikan alur informasi dan arahan yang jelas dalam penanggulangan bencana. Ini melibatkan komunikasi langsung antara BPBD kabupaten dan BNPB untuk menangani situasi darurat secara efisien. Hal ini sejalan dengan pernyataan narasumber yang menyatakan bahwa *“Pemerintah Kalurahan itu kan bekerja sama dengan BMKG, BPBD”*.

Penanganan bencana alam biasanya meliputi kegiatan berskala besar dan mencakup wilayah yang luas, sehingga tentu saja perlu melibatkan banyak pihak agar beban dan tanggung jawabnya menjadi lebih ringan. Pembagian tugas dengan melibatkan banyak orang yang berkepentingan dalam suatu organisasi (Hardjono & Astuti, 2021). Hal ini sejalan dengan pernyataan narasumber yaitu adanya koordinasi dengan PKK, POKGIAT LPM, SATPOL PP, LINMAS Rescue, Jaga Warga, BUMKAL, POKDARWIS, SAR, PMI, BASARNAS, TNI, POLRI, Karang Taruna, TAGANA, Dinas Sosial, GAPOTAN.

Dengan perkembangan teknologi, media sosial telah berevolusi menjadi salah satu alat komunikasi yang sangat strategis dalam mendukung pendidikan dan mitigasi bencana. Media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, menyediakan kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan menjangkau audiens yang luas. Dengan fitur-fitur seperti siaran langsung, unggahan infografis, serta penyebaran pesan singkat, platform ini dapat berfungsi sebagai media yang efisien untuk memberikan peringatan dini, panduan keselamatan, hingga laporan kondisi terkini di lokasi bencana (Rahmawati *et al.*, 2025). Hal ini sejalan dengan pernyataan dari narasumber yang menyatakan bahwa *“Kalau untuk yang sifatnya menggunakan teknologi ya itu tadi, hanya grup whatsapp kita sharing-sharing informasi”*. Selain itu ada juga pendapat lain dari narasumber yang masih

berhubungan dengan pernyataan tersebut, yaitu “*Kita melalui media sosial, melalui live, melalui ini kita sering melakukan tanya-jawab*”

Tema III: Kesiapsiagaan Masyarakat

Tema ini membahas mengenai pengetahuan serta sikap dari masyarakat dan kelompok rentan sebagai persiapan menghadapi bencana. Tanggap darurat dalam kesiapsiagaan harus dimiliki oleh setiap individu untuk menghadapi situasi darurat yang disebabkan oleh bencana alam. Ini merupakan bagian dari suatu proses, terutama yang berkaitan dengan penyelamatan, pertolongan, dan penyelamatan, agar jumlah korban bencana dapat dikurangi (Lestanata, 2022). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa “*Kalau masyarakat Kalurahan Parangtritis alhamdulillah katitannya dengan kebencanaan alhamdulillah 95% sudah paham*”. Kemampuan yang perlu dan penting dimiliki oleh masyarakat sebagai bentuk kesiapsiagaan adalah memiliki pengetahuan mengenai kebencanaan (Amni, Rahmalia, *et al.*, 2024). Pernyataan tersebut tidak sejalan karena menurut narasumber lain, masih ada masyarakat dan anggota yang belum memahami penanganan saat terjadinya bencana seperti yang ada dalam pernyataan berikut “*Penanganan bencana atau simulasinya, walaupun secara umum belum semua mengetahui, baik dari anggota sendiri maupun dari warga-warga pada umumnya*”

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan yang berisiko tinggi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber yaitu adalah “*Kegiatan rentan lainnya seperti disabilitas, disabilitas itu juga pernah dilakukan dari pihak kalurahan itu melalui program-program yang telah dilakukan oleh kader*”. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sangat penting untuk ditanamkan sejak

usia dini (Aris *et al.*, 2022). Menurut Wahyu Kuncoro (2024), anak-anak yang menerima pendidikan kebencanaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merespons ketika situasi darurat terjadi. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber yaitu “*Anak-anak TK, PAUD itu sudah diajarkan bagaimana adanya mitigasi bencana*” dan ada juga pernyataan lain dari narasumber yang sejalan dengan pendapat tersebut yaitu “*Anak-anak itu lewat sejak dari dini, sejak PAUD itu mereka istilahnya diberi pengetahuan jadikan pelatihan pada waktu itu tingkat masing masing itu*”

Tema IV: Tanggap Darurat Bencana

Tema ini membahas mengenai respon yang dilakukan saat terjadinya bencana atau bisa disebut juga intra bencana dengan tujuan menangani dampak buruk yang ditimbulkan saat bencana terjadi.

Dengan membangun masyarakat yang sadar bencana, maka sikap yang tidak diharapkan pada saat situasi bencana berlangsung seperti panik ataupun keos dapat diminimalisir (Rahma, 2018). Sejalan dengan pendapat informan yaitu “*Dalam menghadapi sebuah bencana, di situasi bencana itu biasanya kita keos, artinya bener-bener kita kerepotan*”

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue) yang awalnya berada di bawah (Gustaman *et al.*, 2020). Menurut Delima & Putra (2021), Tim SAR sangat penting untuk mendukung proses evakuasi dalam sebuah penanganan bencana. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari narasumber yang menyatakan bahwa “*Pihak SAR adalah tenaga penyelamatan, artinya kami adalah petugas yang pada saat terjadi bencana atau terjadi sebuah kecelakaan, kamilah petugas yang mengevakuasi*”

Tema V: Evaluasi Pasca Bencana

Dalam tema ini membahas mengenai tindakan yang dilakukan pada saat bencana selesai, atau bisa juga disebut pasca bencana. Pada tahap pasca bencana, narasumber memberikan gambaran yang menyatakan *“Upaya penanganan dan juga mungkin pasca bencananya itu bisa kita lakukan tindakan apa, kalau kita sudah berkoordinasi semuanya akan berjalan dengan baik”*. Pernyataan tersebut sejalan dengan Peraturan Kepala BNPB No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan koordinasi dengan intansi/lembaga dinas secara horizontal pada tahap tanggap darurat dan pascabencana. Rehabilitasi dan evaluasi dari pemerintah sangat diperlukan dalam penanggulangan pasca bencana. Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Didalamnya berisikan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalananya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa *“Untuk yang sudah-sudah terjadi itu, kita evaluasinya ya, kebutuhan kita kurangnya apa”*

KESIMPULAN

Konsep bencana yang digambarkan oleh narasumber dalam penelitian ini yaitu bencana menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerusakan bangunan. Bencana alam mencakup gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor, abrasi, kekeringan, sedangkan bencana non-alam mencakup kebakaran, kecelakaan. Kejadian gempa bumi besar yang mengakibatkan kerusakan parah salah satunya terjadi di Yogyakarta khususnya Kabupaten

Bantul tahun 2006 sehingga Kabupaten Bantul termasuk kawasan rawan bencana.

Sebanyak 14 kecamatan di Yogyakarta termasuk dalam Kawasan yang beresiko tinggi terhadap bencana gempa bumi. Berdasarkan peta risiko bencana, 11 kecamatan berada di Kabupaten Bantul, dan masing-masing satu kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta, serta Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman. Keempat belas kecamatan itu adalah Kasihan, Sewon, Bantul, Pandak, Bambanglipuro, Pundong, Imogiri, Jetis, Pleret, Banguntapan, Piyungan, Kotagede, Ngipar, dan Berbah (Setyaningrum & Rumagutawan, 2018). Pendapat ini sejalan dengan pendapat narasumber yang menyatakan bahwa *“Di sini hitungannya, bencana itu ibaratnya, sebenarnya daerah rawan”*.

Mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Parangtritis yaitu adanya sosialisasi pada masyarakat. Dalam hal mitigasi bencana, Pemerintah Kalurahan Parangtritis juga memberikan anggaran dengan tujuan dibentuknya sosialisasi, pelatihan, himbawan, edukasi untuk masyarakat sebagai upaya dari mitigasi bencana. Pembangunan sirine, pembangunan jalur evakuasi, petunjuk evakuasi, pembangunan akses jalan, titik kumpul, tempat evakuasi, serta pembangunan rumah tahan gempa juga dilakukan sebagai persiapan menghadapi bencana gempa bumi diharapkan mampu dijadikan penunjang. Upaya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan prangtritis dalam persiapan menghadapi bencana yaitu berkoordinasi dengan FPRB, BNPB, BPBD, BMKG, PKK, POKGIAT LPM, SATPOL PP, LINMAS Rescue, Jaga Warga, BUMKAL, POKDARWIS, SAR, PMI, BASARNAS, TNI, POLRI, Karang Taruna, TAGANA, Dinas Sosial, GAPOTAN. Lalu adanya pemanfaatan teknologi dalam koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Parangtritis ataupun sebagai sarana pemberian edukasi dalam persiapan menghadapi bencana yaitu adalah

media sosial seperti Whatsapp, Live, Instagram, Twitter.

Kesiapsiagaan masyarakat dan juga pendidikan sangat penting dalam hal persiapan menghadapi bencana gempa bumi. Sosialisasi kebencanaan, pelatihan, pendidikan diberikan sejak dari dini pada anak-anak, dan juga 95% masyarakat yang tinggal di wilayah Kalurahan Parangtritis sudah paham kaitannya mengenai bencana dan sikap saat bencana terjadi, walaupun tidak sepenuhnya semua masyarakat paham mengenai hal tersebut.

Dalam perihal tanggap darurat bencana, membangun masyarakat yang sadar bencana penting agar sikap yang tidak diharapkan pada saat situasi bencana berlangsung seperti panik ataupun keos dapat diminimalisir. Selain itu, peran SAR sangat penting untuk mendukung proses penyelamatan dan evakuasi jika bencana terjadi.

Upaya penanganan dan juga adanya evaluasi dari lembaga itu sangatlah diperlukan dalam upaya mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kejadian bencana tersebut agar semua dapat berjalan lancar

DAFTAR PUSTAKA

- Amni, R., Aklima, A., Fikriyanti, F., & Nurhidayah, I. (2024). Pengetahuan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir. *Jurnal Ners*, 8(2), 2007-2011.
- Anita, R., Salsabila, Z., & Alhabisyie, S. H. (2021). Jurnal Manajemen Bencana (JMB) The Role Of Social Worker In Post Disaster Trauma Using. 7(2), 77-90. <Https://Doi.Org/10.33172/Jmb.V7i2.707>
- Aris, A. P., Ninasafitri, N., Masruroh, M., Pambudi, M. R., Najmah, N., & Kurniawati, E. (2022). Penyuluhan Budaya Siaga Bencana Siswa SDN 3 Kabilia Bone. *Panrita Inovasi*, 1(1), 1-1. <https://doi.org/10.56680/pijpm.v1i1.36547>
- Bawono, A. S. (2016). Studi Kerentanan Bangunan Akibat Gempa: Studi Kasus Perumahan Di Bantul. *Semesta Teknika*, 19(1), 90-97.
- BNPB No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Buchari, R. A. (2020). Manajemen Mitigasi Bencana Dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 1(1), 1. <Https://Doi.Org/10.24198/Sawala.V1i1.25836>
- Creswell. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. *Pustaka Pelajar*: Yogyakarta
- Delima, M., & Putra, A. Y. M. (2021). Hospital disaster plan dalam perencanaan kesiapsiagaan bencana. *Jurnal Kesehatan Perintis*, 8(1), 54-66.
- Gustaman, F. A. I., Rahmat, H. K., Banjarnahor, J., & Maarif, S. (2020). Peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dalam Masa Tanggap Darurat Tsunami Selat Sunda Tahun 2018. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 462-469
- Hadi, H., Agustina, S., & Subhani, A. (2019). Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Gempabumi. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.29408/geodika.v3i1.1476>
- Hakim, D. M., & Agustina, L. K. (2021). Pemetaan Jalur Evakuasi Tsunami Dengan Metode Network Analysis (Studi Kasus: Kabupaten Lampung Selatan).
- Hardjono, S. S., & Astuti, N. D. (2021). Sinergitas Lembaga Mitigasi dalam Menghadapi Bencana di Desa

- Wonokerto. Jurnal Masyarakat dan Desa, 1(1), 68-86
- Hermon, Dedi (2014). Geografi Bencana Alam. Jakarta: Radja Grafindo Persada Press
- Kuncoro, W. (2024). Komparasi Studi Kasus Pemerintah Jepang dan Indonesia dalam Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana dalam Konteks Masa Pandemi COVID-19. *Geo Governance*, 1(1), 42–49. <https://doi.org/10.61511/gg.v1i1.2024.947>
- Lestanata, Y. (2022). Edukasi Pencegahan Risiko Bencana Bagi Masyarakat Di Desa KekerI Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Yudhi Lestanata 1 1. *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum (JPRH)*, 1(1), 6–10.
- Lubis, Z. N. S., Rahmawati, S., & hHmdi Faisal, F. (2025). Peran Media Sosial dalam Edukasi dan Mitigasi Bencana di Era Digital. *Warta Dharmawangsa*, 19(1), 23-33.
- Purwanto, D., Damas Permadji, D., Sukmayu Saputri, U., Umar Aditiawarman, Dini Oktarina Dwi Handayani, & Deshinta Arovva Dewi. (2023). Kajian Tentang Bencana Dan Dampak Gempa Bumi Di Cianjur Bersama Mahasiswa Teknik Sipil Nusaputra. *Jurnal Abdi Nusa*, 3(1), 36–39. <Https://Doi.Org/10.52005/Abdinusa.V3i1.130>
- Septiawan, Burhanuddin (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Korban Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Majene
- Sidik, M. R. N., & Sembiring, U. R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. (Doctoral dissertation, IPDN).
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alphabet.
- Sulistiyana, dkk. 2018. Duka dari Bumi Projotamansari: Arsip Korban Gempa Bumi 2006 di Bantul. Yogyakarta: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pengaggulangan Bencana, (2007).
- Yanuarto, T., Pinuji, S., Utomo, A. C., & Satrio, I. T. (2019). Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana (4th Ed.). Pusat Data Informasi Dan Humas Bnbp.

Lampiran:

Tabel 1. Karakteristik Informan

Kode informan	Informan	Usia	Jenis kelamin	Jabatan
1	N1	55	L	Dukuh
2	N2	29	L	Kalurahan
3	N3	34	L	Kalurahan
4	N4	30	L	Kalurahan
5	N5	53	L	FPRB
6	N6	46	L	RT
7	N7	44	L	RT

Keterangan :

N = Narasumber

L = Laki – laki

P = Perempuan

Tabel 2. Konsep Bencana

Koding	Kategori	Tema
Gempa 2006	Pengalaman bencana	Konsep Bencana
Bukit		
Wilayah kecil	Daerah Rawan Bencana	
Kawasan pantai		
Banyak destinasi		
Desa budaya		
Gunung		
Alam (tantangan)		
Daerah rawan		
Gempa	Contoh Bencana	
Tsunami		
Kebakaran		
Banjir		
Tanah longsor		
Kekeringan		
Abrasi		
Kecelakaan		
Bencana beragam		

Tabel 3. Mitigasi Bencana

Koding	Kategori	Tema
Anggaran	Upaya Pemerintah	Mitigasi Bencana
Usulan dari bawah		
Fasilitas		
Kesiapan petugas		
Pembangunan Infrastruktur		
Arahan		
Persiapan Pemerintah		
Mitigasi		
Bersinergi		
Laporan Dusun		
Alat		
Minim pembangunan		
Koordinasi penting		
Berjalan baik (koordinasi)		
Ada koordinasi		
Pertemuan		

Cepat tercapai (koordinasi)
Upaya pencegahan
Lancar (mitigasi)
Tidak pasti (bencana)
Ditingkatkan dan dipertahankan (mitigasi)
Masalahnya macam macam (mitigasi)
Biaya
Fasilitas (Kendala)
Minim petugas
Belum (Solusi)
Update (kebutuhan)
Undang di Aceh (FPRB)
Diakui UNESCO
TRC
Internasional (FPRB)
Solutinya Belum
Arsitektur Jawa

Pelatihan	Pemberdayaan masyarakat
-----------	----------------------------

Pelajaran khusus tidak ada
Pendidikan Bencana
Kunjungan
Pemberdayaan
Kebijakan dan Program
Pengabdian Kebencanaan
Drill Tsunami dan Gempa
Himbawan
Peningkatan Kapasitas
Simulasi dan informasi
Tanya jawab
Kegiatan
Belum mampu (Simulasi)
Diberi pengetahuan
Pengetahuan lewat pengajian
Lewat Nyanyian
Sampaikan ke anak didik (pendidikan)
Sosialisasi
Edukasi
Outing kelas
Belum menyeluruh (Edukasi)
Edukasi Titik Evakuasi
HKB
Keamanan dan pencegahan (Wisata pan
Pemberdayaan Penting

Femberdayaan Penting	Alarm dan EWS	Infrastruktur dan Fasilitas
----------------------	---------------	-----------------------------

Tempat Evakuasi
Pos Pos
Titik Kumpul
Jalur dan Petunjuk Evakuasi
Penggunaan kayu
Antisipasi
Tidak Terlau Beresiko (kayu)
Tahan (kayu)
Papan Penanda
Dekat Pemukiman
Struktur pembangunan
Bngunan tahan gempa
Akses jalan baik
Corblok (Jalan)
Aspal (Jalan)
Pembenahan

Mudah di akses

Aman (Akses infrastruktur)

Efisiensi dan manfaat (pembangunan)

Konstruksi bangunan

Alat (tantangan)

Tenaga aktif (FPRB)

Instansi dan Kelompok

SOP (FPRB)

Relawan

PKK

POKGIAIT LPM

FPRB

SATPOL PP

Ditpolairud

LINMAS Rescue

Jaga Warga

BUMKAL

POKDARWIS

BNPB

BPBD

BMKG

SAR

PMI

BASARNAS

TNI

POLRI

Karang Taruna

TAGANA

Dinas Sosial

Kalurahan

Kecamatan

Dukuh

RT

Tim Reaksi Cepat

GAPOTAN

Kader

Membantu Kinerja

Efektif

Tertata (kelompok)

Posyandu

Lembaga Pemerintahan

Visi yang berbeda (Kelembagaan)

Lembaga dan organisasi (Kebencanaan)

Basicnya beda beda

90han anggota FPRB

11 Dusun

55 RT

Kampus

Media Sosial

Media Komunikasi

Live

Akses internet

Aplikasi BMKG

EWS Layar

Twiter

Whatsapp

Instagram

Radio

Laptop

HT

Tabel 4. Kesiapsiagaan Masyarakat

Koding	Kategori	Tema
Masyarakat mengetahui	Pengetahuan dan sikap masyarakat	Kesiapsiagaan Masyarakat
Masyarakat belum mengetahui (Penanganan Bencana)		
Belum sadar (masyarakat)		
Ngeyel dan mengabaikan (masyarakat)		
Aktif (anggota)		
Ngikut (Masyarakat)		
Susah (masyarakat)		
Mudah (Diatur)		
Dipaksa (masyarakat)		
Tahu dan sadar		
Posyandu lansia	Kelompok Rentan	
Posyandu balita		
Posyandu remaja		
Disabilitas		
Lansia diprioritaskan		
Ibu hamil menyusui		
Pemberian makanan (Pada ibu hamil)		
Pengunjung dan wisatawan		
TK dan PAUD		
SD		
SMP		

Tabel 5. Tanggap Darurat Bencana

Koding	Katagori	Tema
Evakuasi	Intra Bencana	Tanggap darurat bencana
Penyelamatan dan evakuasi		
Keos dan Kerepotan		

Tabel 6. Evaluasi Pasca Bencana

Koding	Kategori	Tema
Evaluasi (pasca)	Pasca Bencana	Evaluasi pasca bencana
Sar melakukan tindakan (pasca bencana)		